

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
MELALUI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI KECAMATAN  
TALANG KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

M. Fathur Rahman Febrianto

NPP. 29.0409

*Asdaf Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan  
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan  
Fakultas Politik Pemerintahan*

Email: [fathurrahman9191@gmail.com](mailto:fathurrahman9191@gmail.com).

**ABSTRACT**

**Problem Statment/Background (GAP):** This research is motivated by the interest of researchers regarding the problem of empowering Micro, Small and Medium Enterprises, namely related to limited business capital and lack of knowledge in managing their finances. Based on the background, the researcher raised the questions: empowering MSMEs through the People's Business Credit (KUR) program in Talang Kelapa District, Banyuasin Regency, South Sumatra Province, What are the inhibiting factors for MSME empowerment through the People's Business Credit (KUR) program, What are the government's efforts to overcome the inhibiting factors that arise in empowering MSMEs through the KUR program. **Purpose:** The purpose of this study is to describe how the process of empowering MSMEs through the KUR Program. **Method:** This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. There are 3 phases of empowerment, namely: (1) the initial phase of the Department of Trade, Cooperatives, and UKM Banyuasin who play a full role in empowering UMKM. (2) the participatory phase of the community and the government has collaborated in developing MSMEs. (3) the emancipatory phase of the Banyuasin Trade, Cooperative, and UKM Office only acts as a supporter of every activity carried out by UMKM. **Result:** Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the empowerment of MSMEs through the KUR Program in Talang Kelapa District is still not running optimally. The empowerment of MSMEs through the KUR program is still faced with various problems that hinder the implementation of the business development. Especially MSMEs who are still pragmatic in empowering the KUR program. **Conclusion/sugestion:** MSME suggestions should open their minds not to be pragmatic towards the KUR program, they must be involved and enthusiastic in this KUR program  
**Keywords:** Empowerment, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), People's Business Credit (KUR).

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan peneliti mengenai masalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu terkait terbatasnya modal usaha dan kurangnya pengetahuan dalam mengelola keuangannya. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengangkat pertanyaan penelitian : Bagaimana pemberdayaan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Apa faktor penghambat pemberdayaan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Apa upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat yang muncul dalam pemberdayaan UMKM melalui program KUR. **Tujuan:** Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana porses pemberdayaan UMKM melalui Program KUR. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Pemberdayaan yang dilakukan ada 3 fase yaitu: (1) fase inisial Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Banyuasin berperan penuh dalam memberdayakan UMKM. (2) fase partisipatoris masyarakat dan pemerintah sudah berkolaborasi dalam mengembangkan UMKM. (3) fase emansipatoris Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Banyuasin hanya berperan sebagai pendukung dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh UMKM. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui Program KUR di Kecamatan Talang Kelapa masih belum berjalan optimal. Pemberdayaan UMKM melalui program KUR tersebut masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang menghambat terlaksananya pengembangan usaha tersebut. Terutama UMKM yang masih pragmatis dalam pemberdayaan program KUR. **Kesimpulan dan Saran:** Saran UMKM seharusnya membuka pemikiran untuk tidak bersikap pragmatis terhadap program KUR, harus dapat terlibat dan antusias dalam program KUR ini.

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kredit Usaha rakyat (KUR).*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial dan pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Soetomo, 2013:294). Kesejahteraan dikatakan makmur, yaitu ketika meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang kemudian bertujuan untuk pemerataan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Terpenting dari paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi akan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Menurut Sadono Sukirno (1985: 15) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi pendapatan per kapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah produksi barang dan jasa, percepatan pemerataan

pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan hal terpenting bagi perekonomian nasional, yang sebagai bentuk keberpihakan yang kuat dari kelompok-kelompok usaha rakyat, harus menjaga peluang, perlindungan, dan pengembangan yang paling penting sebanyak mungkin. Selain itu, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat, serta berperan dalam menghasilkan pemerataan dan pendapatan bagi masyarakat. Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi hingga 61,07% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari total angkatan kerja nasional (profil usaha UMKM LPMI dan BI, 2020). UKM tampaknya juga tidak terpengaruh oleh krisis. Ketika krisis meletus antara tahun 1997 dan 1998, hanya UMKM yang bisa bertahan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah UMKM tidak berkurang setelah krisis ekonomi 1997-1998, tetapi UMKM meningkat dan menyerap 85 juta hingga 107 juta pekerja pada 2012. KUR merupakan program pemerintah untuk peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, yang dijalankan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR bertujuan untuk memperkuat kapasitas permodalan usaha terkait dengan pelaksanaan langkah-langkah percepatan pengembangan sektor riil dan penguatan UMKM. Untuk mencapai hal tersebut, pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Inpres No. 6 tentang kebijakan percepatan pembangunan sektor riil dan penguatan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal (lima) 5 November 2007. Pembiayaan yang dibayarkan oleh KUR berasal dari dana bank atau lembaga keuangan yang menjadi mitra penjualan KUR.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Dari permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di kecamatan Talang Kelapa. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dapat memberikan peranan penting dalam membantu UMKM dalam hal mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi untuk memberdayakan dan mempertahankan UMKM tersebut dengan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan adanya program KUR UMKM dapat mampu mendapatkan tambahan modal yang berdampak positif bagi pengembangan dan pengelolaan manajemen usahanya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayuni Lathifah (2019) yaitu tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandiri Kecamatan Gunung Pati yang menyimpulkan bahwa Proses pemberdayaan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan kegiatan ini dapat memberikan wawasan dan keterampilan kepada anggota UMKM Mekarsari dalam pemasaran online. Terdapat berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaannya antara lain ilmu pengetahuan, karena ada sebagian warga yang masih melek teknologi untuk mengetahui sistem kewirausahaan modern yang lebih sederhana dan efisien, produk olahan anggota UMKM Mekarsari seperti jajanan, keripik dan lain-lain yang pemasarannya masih terbatas di daerah yang tenang. Saran dari penelitian ini adalah agar Himpunan Mekarsari lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui UMKM agar anggota UMKM tetap semangat menjalankan usahanya.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Berdasarkan judul penelitian ini dan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yaitu pada penelitian sebelumnya membahas tentang Evaluasi sementara pada penelitian kali ini membahas mengenai Implementasi. Berikutnya untuk lokasi penelitian terdapat perbedaan yang dimana pada penelitian sebelumnya dilakukan di kabupaten Belitung dan kota samarinda dan untuk persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama menggunakan Metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari objek penelitian ,seperti pada kedua penelitian terdahulu yang di cantumkan,yaitu : Evaluasi program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung ( Bambang Winarno (2018) ) dan Evaluasi kebijakan pembangunan rumah layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda ( Ibnu Abas (2015) ) yang pada dasarnya mengarah pada kekurangan dan kelemahan dalam program pemerintah.berbeda dengan penelitian kali ini dimana peneliti mengarah pada Implementasi program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui program rumah layak huni di kabupaten Timor Tengah Utara.Oleh karena itu,penelitian yang dilakukan menjadi jelas posisinya,yaitu sebagai pembanding dan sumber inspirasi untuk meminimalisir kegagalan dalam penelitian yang akan dilakukan.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Pertama penelitian Ayuni Lathifah (2019), Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandiri Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap yaitu persiapan, penilaian, pelaksanaan, evaluasi dan penghentian. Faktor pendorong pemberdayaan masyarakat ini adalah dukungan pemerintah dalam bentuk program dan sumber daya, serta motivasi masyarakat yang tinggi untuk memanfaatkan potensi lokal dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pengetahuan dan wawasan tentang teknik pemasaran online dan pemasaran yang belum dikembangkan secara besar-besaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses pemberdayaan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan kegiatan ini dapat menambah wawasan dan keterampilan dalam pemasaran online bagi anggota UMKM Mekarsari. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya adalah ilmu pengetahuan karena masih ada sebagian warga yang masih melek teknologi untuk mengetahui tentang sistem kewirausahaan modern yang lebih sederhana dan efisien, hasil olahan UMKM Himpunan Mekarsari seperti *snack*, keripik dll. masih dalam lingkup wilayah Kandri yang cukup lesu dan sepi. Saran dari penelitian ini adalah Paguyuban Mekarsari harus lebih aktif dan kreatif dalam membuat program pemberdayaan masyarakat melalui UMKM agar anggota UMKM tetap semangat dalam menjalankan usahanya. Penelitian Kedua, Suhermanto (2020), Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Maros Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan (UKM) pada Dinas Kopumdag belum berjalan secara optimal. Pemberdayaan yang dilakukan memiliki 3 (tiga) fase, yaitu: (1) fase inisial Dinas Koperasi berperan penuh dalam penguata UMKM. (2) tahap partisipatoris masyarakat dan pemerintah telah bekerjasama dalam pengembangan UKM. (3) fase emansipatoris Dinas

Koperasi UKM dan perdagangan hanya berperan sebagai pendukung setiap kegiatan UKM. Namun, pemerintah masih terbatas dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan UKM. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM di Kabupaten Maros harus memastikan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan pelatihan atau pembinaan dapat optimal dan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Penelitian Ketiga, Okta Septiana Wati (2019), Peranan KUR Terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus BPD Lampung KC Bandar Jaya Lampung Tengah) Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “Kredit Usaha Rakyat berperan dalam pemberdayaan UKM di BPD Lampung KC Bandar Jaya, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Dan setelah mendapat tambahan modal, ternyata usaha milik klien mengalami peningkatan, baik menurut jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pinjaman yang diberikan oleh bank memiliki peranan sebagai alternatif sumber pendanaan eksternal dengan bunga rendah, dengan mengamati perubahan yang terjadi antara sebelum dan sesudah usaha memperoleh KUR, dapat dilihat bagaimana perkembangan usaha setelah memperoleh KUR meningkatkan taraf hidup para pengusaha atau usaha UMKM dan membantu usaha kecil dan menengah untuk fokus pada produktivitas.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat (KUR) di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

## **II. METODE**

Penelitian kali ini penulis menggunakan Penelitian kualitatif umumnya dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dll. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti bahwa metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang terkadang sulit dipahami. Penulis berencana menggunakan metode deskriptif dalam kegiatan penelitiannya. Menurut Nazir (2014:43), metode deskriptif adalah suatu metode yang mempelajari status sekelompok orang, suatu objek, keadaan, sistem pemikiran, atau suatu golongan peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat menggambarkan, menggambarkan atau menggambarkan fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Berdasarkan penjelasan dari penulis, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta yang saling berhubungan serta bukan hanya mencari kebenaran mutlak, tetapi juga mencari pemahaman observasinya. Selain dianalisis, kemudian menarik kesimpulan yang sifatnya hanya mendalami sebuah peristiwa, serta tidak berlaku secara umum, tetapi hanya berlaku pada daerah yang dijadikan objek penelitian. Dengan metode pendekatan penelitian ini penulis dapat mendeskripsikan mengenai situasi dan kondisi yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat UMKM di Kecamatan Talang Kelapa melalui Program Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Banyuasin dengan mengumpulkan data dan fakta di lokasi penelitian untuk dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.**

Pemerintah sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat, demikian juga pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Talang Kelapa melalui program KUR untuk pelaku UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UMKM merupakan salah satu urusan pemerintahan yaitu Urusan pemerintahan pilihan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa yang menyelenggarakan urusan pemerintah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi, yaitu kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri dan berdasarkan tugas pembantuan dengan menggunakan asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu penggolongan urusan pemerintahan menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Urusan Pemerintahan Serentak yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam Pasal 1 ayat (3) urusan UMKM termasuk dalam urusan pemerintahan tertentu. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Menengah Kabupaten Banyuasin telah melakukan pemberdayaan UMKM sebagai urusan pemerintahan pilihan, pada dasarnya adalah usaha yang tujuannya untuk memanfaatkan sumber daya hasil UMKM secara maksimal dalam rangka menambah pendapatan serta untuk mensejahterakan masyarakat (khususnya pelaku utama UMKM) dan dalam kegiatannya tetap menjaga, memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Pemberdayaan UMKM melalui program KUR Di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dilaksanakan berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 63 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakat dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu pemerintah dan pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban memotivasi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha dengan cara meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, memberikan akses teknologi dan informasi, memberikan modal, membangun infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya, berdasarkan Undang Undang tentang pemerintah daerah yang sudah disebutkan di atas, pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan Program KUR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bidang UMKM merupakan bagian dari urusan pemerintahan yaitu Urusan pemerintahan pilihan. Berdasarkan susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin, untuk mengurus pemberdayaan UMKM melalui Program KUR merupakan tugas bidang UMKM, dalam pemberdayaan UMKM. Dimana dalam program ini masyarakat berusaha diberdayakan melalui kegiatan UMKM. Pembahasan mengenai pengembangan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin. Penulis menggunakan perspektis teoritis yang relevan dengan fenomena yang dikaji. Tinjauan secara teori merupakan cara

untuk melihat atau menggali teori dengan sudut pandang keilmuan, sehingga didapatkan suatu pendekatan yang bisa mengungkapkan substansi masalah yang dikaji atau diteliti. Tinjauan teori memberikan penjelasan secara objektif, empiris, dan sistematis tentang Pemberdayaan UMKM melalui Program KUR di Kecamatan Talang Kelapa oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Teori pemberdayaan yang digunakan adalah teori menurut Pranaka dan Priyono (1996) dapat diwujudkan dalam 3 (tiga) fase, yaitu fase inisial, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris.

### **1. Fase Inisial**

Berdasarkan fokus penelitian pada fase ini, dibagi menjadi beberapa indikator sebagai ukuran keberhasilan dalam membangun dan mengembangkan UMKM di Kabupaten Banyuasin. Indikator yang dimaksud adalah pengenalan program pemerintah dan penyuluhan program KUR yang dirumuskan terkait dengan pengembangan UMKM. Sosialisasi ini melibatkan seluruh sumber daya manusia untuk memperoleh pengetahuan belajar sehingga mereka akan segera dapat menggunakannya dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan menurut Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan Perdagangan UMKM Kabupaten Banyuasin yang digunakan untuk melaksanakan sosialisasi terkait Program Pemerintah, dialokasikan dari APBN dan APBD. Indikator untuk fase ini adalah:

#### **a) Sosialisasi terkait program pemerintah.**

Pada dasarnya sosialisasi diperlukan karena adanya kekurangan yang ada di UMKM yang dibutuhkan dengan pengetahuan yang dimiliki sekarang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah usaha mikro mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin dibandingkan jenis usaha kecil. Selain itu, Diklat Pengembangan UMKM menurut data tersebut dilaksanakan melalui kerjasama oleh Dinas koperasi dan UMKM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin yang diselenggarakan di Banyuasin. Sedangkan sosialisasi yang diselenggarakan sepanjang tahun 2021 hanya akan dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali. Padahal seharusnya sosialisasi ini menjadi agenda rutin dan dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk mengembangkan sumber daya baik di dalam diri sendiri maupun bagi anggotakoperasi yang ada.

#### **b) Penyuluhan terkait program Kredit Usaha Rakyat (KUR).**

Salah satu Program Pemerintah yang sudah terlaksana untuk mengembangkan UMKM yakni Program Kredit Usaha Rakyat. Penyuluhan yang berguna untuk meningkatkan pengembangan UMKM. Adapun penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu Program Kredit Usaha Rakyat yang dicanangkan untuk memberikan Modal kepada pelaku UMKM melalui Program ini.

## 2. Fase Partisipatoris

Tahap partisipatif merupakan proses pemberdayaan yang berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat, dan ditujukan untuk masyarakat. Pada tahap partisipatif, proses pemberdayaan pada dasarnya dari pemerintah bersama rakyat dan ditujukan untuk rakyat. Pada tahap ini peran pemerintah semakin dikurangi dengan melibatkan masyarakat secara aktif menuju kemandirian.

### a) Keterlibatan UMKM dalam Setiap Program.

Fase ini akan membahas tentang sejauh mana keterlibatan UMKM dalam mendukung dan melaksanakan program KUR dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin. Sejauh ini, UMKM apakah terlibat untuk mengikuti program-program yang diadakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, tapi yang menjadi masalah adalah program KUR dari dinas ini. Untuk mengikuti program KUR ini UMKM harus memenuhi persyaratan yang ada untuk mengikuti program KUR.

### b) Antusias Masyarakat dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam fase ini, UMKM juga bisa membuat beberapa saran untuk program KUR ini. Tapi sayangnya, sejauh ini masyarakat belum ada atau belum aktif memberikan saran dan masukan ke pemerintah mengenai KUR ini. Sepertinya UMKM masih belum peduli terhadap Program ini. Mereka seperti boneka yang hanya digerakkan oleh pemerintah, partisipasi mereka masih sangat kurang.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat perbandingan perkembangan usaha antara UMKM yang mengikuti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan yang belum mengikuti Program KUR. Terlihat dari jumlah tingkat produksi dan juga jumlah keuntungan usahanya. UMKM yang mengikuti Program KUR mereka merasa sangat berdampak sekali terhadap perkembangan UMKM nya dibandingkan sebelum mengikuti Program KUR. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhermanto (2020) dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui program KUR di Kecamatan Talang Kelapa masih belum berjalan optimal, masih banyak UMKM yang belum antusias dan terlibat dalam Program KUR ini, kedepannya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Program KUR ini. Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM mengharapkan apa yang menjadi target dari pemerintah mengenai Program KUR ini bisa terealisasi. Ini juga bertujuan untuk UMKM dapat meningkatkan perkembangan usahanya.



### **3. Fase Emansipatoris**

Pada Pada tahap ini, masyarakat diberdayakan dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, pemberdayaan yang dilakukan oleh Kantor Kopumdag Kabupaten Banyuasin harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk memberdayakan usaha-usaha tersebut, diperlukan dukungan, perlindungan, dan pengembangan yang utuh dan seluas-luasnya dari instansi terkait. s dapat disimpulkan bahwa terlihat sekali perbedaan perkembangan usahanya antara yang belum mengikuti program KUR dan yang telah mengikuti program KUR. Ini berarti Porgram KUR dari pemerintah memiliki banyak manfaat terhadap UMKM dalam perkembangan usahanya, hanya saja masih banyak UMKM belum mengikuti program ini. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat perbandingan perkembangan usaha antara UMKM yang mengikuti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan yang belum mengikuti Program KUR. Terlihat dari jumlah tingkat produksi dan juga jumlah keuntungan usahanya. UMKM yang mengikuti Program KUR mereka merasa sangat berdampak sekali terhadap perkembangan UMKM nya dibandingkan sebelum mengikuti Program KUR. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhermanto (2020) dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui program KUR di Kecamatan Talang Kelapa masih belum berjalan optimal, masih banyak UMKM yang belum antusias dan terlibat dalam Porgram KUR ini, kedepannya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Program KUR ini. Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM mengharapkan apa yang menjadi target dari pemerintah mengenai Program KUR ini bisa terealisasi. Ini juga bertujuan untuk UMKM dapat meningkatkan perkembangan usahanya.

#### **3.2 Faktor Penghambat Pemberdayaan UMKM melalui Program KUR di Kecamatan Talang Kelapa**

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan UMKM melalui Program KUR di Kecamatan Talang Kelapa adalah:

##### **1. UMKM masih bersifat tradisional**

15 UMKM di kawasan talang kelapa tersebut masih sederhana karena dalam pengemasan kerupuk masih menggunakan peralatan lama yakni menggunakan alat perekat plastik dalam proses pengemasan produk.

##### **2. UMKM lebih tertarik melakukan pinjaman ke pihak lain**

UMKM dikecamatan Talang Kelapa lebih tertarik melakukan pinjaman pihak lain dikarenakan pengajuannya yang cepat serta tidak terlalu banyak membutuhkan persyaratan dibandingkan mengikuti program KUR pemerintah.

##### **3. Kredit Bermasalah yang di alami UMKM yang mengikuti Kredit Usaha Rakyat** Resiko kredit adalah kerugian akibat tidak tertagihnya dana yang telah

dicairkan dan kredit yang tergolong macet adalah kredit yang sulit ditagih akibat UMKM yang belum melunasi tagihannya sehingga modal KUR yang dimiliki pemerintah terhambat. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM yang mengikuti program KUR masih ada yang belum bisa mengelola keuangannya dengan baik terhadap modal yang dimiliki. Sehingga berdampak kepada modal KUR yang dimiliki pemerintah menjadi terhambat untuk melanjutkan Program KUR ini ke UMKM yang lain.

### **3.3. Upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan UMKM melalui Program KUR di Kecamatan Talang Kelapa**

Upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan UMKM melalui Program KUR di Kecamatan Talang Kelapa adalah:

#### **1. Mengubah Pemikiran Pengusaha**

Dalam memberikan upaya tentang UMKM di kawasan Talang Kelapa yang masih sederhana. Dinas Perdagangan Koperasi UKM memberikan sosialisasi yang bertujuan dalam Peningkatan Pengetahuan dan mengubah mindset. Pemerintah telah memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait program Pemerintah kepada UMKM yang masih berpikir tradisional dalam menjalankan usahanya. Pemerintah telah mengharapkan UMKM dapat lebih efektif dan efisien dalam proses produksinya.

#### **2. Memberikan pendanaan dengan bunga rendah**

Dalam pemberdayaan UMKM terdapat kendala yang dihadapi diantaranya keterbatasan modal. Untuk itu, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan bunga rendah. Menurut beberapa UMKM yang peneliti wawancarai merasa terbantu dengan adanya program KUR (Kredit Usaha Rakyat), karena bunga yang ditetapkan dinilai ringan dan tidak memberatkan. Dan dirasa Program KUR dari pemerintah ini aman dibandingkan meminjam ke pihak lain yang belum diketahui keamanannya.

#### **3. Membantu UMKM untuk fokus pada kinerja produktivitas**

Dengan mengambil pembiayaan KUR berarti diperlukan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, UMKM tidak terlalu mementingkan permodalan, hanya fokus pada bagaimana meningkatkan penjualan produknya untuk mendapatkan keuntungan. Sebelum adanya KUR, pemilik usaha bingung mencari tambahan modal karena suku bunga yang tinggi, yang justru mempersulit nantinya, karena keuntungannya habis untuk membayar cicilan kredit dan bunga. KUR dinilai fleksibel dan mudah serta dapat dirasakan oleh pengusaha kecil, dengan bunga 5% per tahun tidak memberatkan mereka,

sehingga dengan bunga kecil penjualan tidak terpengaruh karena pembayarankredit tidak memberatkan.

### 3.4. Diskusi Utama Penelitian

Pelaksanaan Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat (KUR)-di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan mengubah pemikiran pengusaha dalam memberikan upaya tentang UMKM di kawasan Talang Kelapa yang masih sederhana. Dinas Perdagangan Koperasi UKM memberikan sosialisasi yang bertujuan dalam Peningkatan Pengetahuan dan mengubah *mindset*. Serta membantu UMKM untuk fokus pada kinerja produktivitasnya. Dengan mengambil pembiayaan KUR berarti diperlukan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, UMKM tidak terlalu mementingkan permodalan, hanya fokus pada bagaimana meningkatkan penjualan produknya untuk mendapatkan keuntungan. Sebelum adanya KUR, pemilik usaha bingung mencari tambahan modal karena suku bunga yang tinggi, yang justru mempersulit nantinya, karena keuntungannya habis untuk membayar cicilan kredit dan bunga. KUR dinilai fleksibel dan mudah serta dapat dirasakan oleh pengusaha kecil, dengan bunga 5% per tahun tidak memberatkan mereka, sehingga dengan bunga kecil penjualan tidak terpengaruh karena pembayarankredit tidak memberatkan.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan peneliti maka secara taktis penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa Pemberdayaan Pemberdayaan UMKM melalui program KUR di Kecamatan Talang Kelapa belum berjalan maksimal. Pemberdayaan yang telah dirumuskan bahkan telah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, pemberdayaan UMKM melalui program KUR masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan pengembangan usaha. Terutama paradigma masyarakat sebagai UMKMyang cenderung pragmatis dalam memandang pemberdayaan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Sehingga secara garis besar pemberdayaan UMKM di Kabupaten Banyuasin dapat dikatakan belum berjalan maksimal. Indikator yang menjadi tolak ukur optimal tidaknya pemberdayaan tersebut yaitu:

- a. Fase Inisial, dimana Dinas Koperasi berperan penuh dalam memberdayakan pelaku UMKM melalui sosialisasi dan penyuluhan sehingga tercipta sumber daya yang berkualitas. Akan tetapi sejauh ini, pemerintah masih jarang memberikan sosialisasi kepada UMKM sehingga berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Di sisi lain terkait penyuluhan masih ada juga program KUR yang dijalankan oleh pemerintah saat ini masih sulit didapatkan oleh UMKM terlihat dari kendala-kendala yang telah disampaikan oleh salah satu UMKM.

- b. Fase Partisipatoris, dimana para pelaku UMKM sudah bisa melibatkan diri dalam setiap program yang ada, juga antusias dalam mengembangkan UMKMnya sehingga koordinasi antara Dinas dan UMKM terjalin dengan baik. Sejauh ini UMKM untuk mengikuti program KUR ini UMKM masih terkendala dalam memenuhi persyaratan yang ada untuk mengikuti program KUR. Sebenarnya UMKM juga bisa membuat beberapa saran untuk program KUR ini. Tapi justru, sejauh ini masyarakat UMKM belum ada atau belum aktif memberikan saran dan masukan ke pemerintah mengenai KUR ini. Dalam fase ini, kita dapat melihat bahwa UMKM mau melibatkan diri dalam setiap program tapi tidak berantusias dalam memikirkan manfaat apa yang bakal didapatkan jika mengikuti program tersebut.. Mereka melimpahkan sepenuhnya pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan.
- c. Fase Emansipatoris dimana Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan hanya berperan sebagai pendukung dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh UMKM. Namun melihat realitanya, pemerintah belum bisa menjalankan perannya karena sebagian besar pelaku usaha yang ada masih belum menemukan kemampuan untuk memberdayakan usahanya sendiri, dilihat dari perbedaan perkembangan usaha antara yang belum mengikuti program KUR. dan mereka yang telah mengikuti program KUR. Ini berarti Program KUR dari pemerintah memiliki banyak manfaat terhadap UMKM dalam perkembangan usahanya, hanya saja masih banyak UMKM belum mengikuti program ini.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dariinforman yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan referensi Pemberdayaan mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat (KUR) di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

**Arah Masa Depan Penelitian: (future work):** Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Pemberdayaan mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat (KUR) di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Pranaka dan Prijono. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Suhermanto, dkk. 2021. “Pemberdayaan Pelaku UKM Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (KOPUMDAG) Kabupaten Maros”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol . 2 (2) : hal. 474 – 487.

Soetomo. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama

Sukirno, S. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI

